

**PEMETAAN KAWASAN WILAYAH PERMUKIMAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DI PERDESAAN (STUDI KASUS: KECAMATAN PALENGAAN DAN
KECAMATAN BATUMARMAR, KABUPATEN PAMEKASAN)**

Fahrul Yahya¹, Septa Erik Prabawa¹, Melisa Amalia Mahardianti¹, Aldea Noor Alina¹

¹Dosen Teknik Geomatika-Fakultas Teknik Universitas Dr.Soetomo

Kampus : Kompleks Taman Pendidikan Dr.Soetomo Jl. Semolowaru (Nginden Semolo) No.84 Surabaya, -
Telp./Faks: (031) 5993048, 5947185/ Fax (031) 5938935, e-mail: fahrul.yahya@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Rumah tidak layak huni pada umumnya berkaitan dengan permukiman kumuh dan banyak dijumpai masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Kawasan Perdesaan Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat pertumbuhan permukiman yang cukup besar. Perkembangan fisik tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak-dampak kepadatan terhadap hunian atau dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Munculnya kawasan permukiman kumuh, kondisi fisik hunian yang tidak layak huni, nilai lahan semakin mahal, kemiskinan penduduk perkotaan yang disebabkan kemampuan pendataan masyarakat yang rendah dan kurang dapat bersaing didalam kehidupan perkotaan menjadi permasalahan awal akan munculnya hunian-hunian liar dan kumuh dan dikategorikan sebagai hunian tidak layak huni. Terdapat dua analisis yaitu *backlog* Kepenghunian dihitung mengacu pada konsep perhitungan ideal, satu keluarga menghuni satu rumah dan *backlog* kepemilikan dihitung berdasarkan angka *home ownership rate* atau persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri, dimana sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data BPS. Dari hasil analisis perhitungan *Backlog* Kepenghunian bersumber dari data survei lapangan di Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Batumarmar dimana *Backlog* Kepenghunian di Kecamatan Palengaan berjumlah 3874 unit rumah dan *Backlog* Kepemilikan berjumlah 2014 unit rumah dan *Backlog* Kepenghunian di Kecamatan Batumarmar berjumlah 880 unit rumah dan *Backlog* Kepemilikan berjumlah 2474 unit rumah.

Kata kunci : *Permukiman, Rumah Tidak Layak Huni, Backlog kepenghunian, Backlog Kepemilikan, home ownership rate.*

ABSTRACT

Unfit for habitation is generally associated with slum settlements and many poor or underprivileged people are found. A house that is not suitable for habitation is a dwelling or place to live that is not suitable for habitation because it does not meet the requirements for housing both technically and non-technically. Housing is unfit for habitation as a condition in which the house and its environment do not meet the proper requirements for housing either physically, healthily, socially. Pamekasan District has a fairly large settlement growth rate. This physical development will indirectly have density impacts on shelter, social impacts on local communities. The emergence of slum areas, the physical conditions of housing that are not suitable for habitation, the more expensive land value, the poverty of the urban population due to the low and less competitive ability of community data collection in urban life are the initial problems with the emergence of squatter and slum dwellings and are categorized as dwellings. uninhabitable. The analysis uses two analyzes, namely the Residential backlog, which is calculated referring to the ideal calculation concept, one family inhabiting one house and the ownership backlog is calculated based on the homeownership rate or the percentage of households (households) who occupy their own houses, where the basic data source is used in the calculation. this is sourced from BPS data. From the results of the analysis of the Residential Backlog calculation, the data comes from the field survey data in Palengaan and Batumarmar Districts where the Residential Backlog in Palengaan District is 3874 housing units and the Ownership Backlog is 2014 housing units and the Residential Backlog in Batumarmar District is 880 houses and the Ownership Backlog is 2474 house units.

Keywords : *Settlements, Uninhabitable Houses, Residential Backlog, Ownership Backlog, home ownership rate*

1. PENDAHULUAN

Menurut (UU No.1, 2011) Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, sertamempunyai penunjang kegiatan lainnya. Perkembangan fisik tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak-dampak kepadatan terhadap hunian atau dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Munculnya kawasan permukiman kumuh,

2. KONSEP PERHITUNGAN BACKLOG

Definisi dari *backlog* adalah Backlog adalah selisih antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat (Bimantoro & Widayanti, 2020) *backlog* dapat juga diartikan sebagai jumlah rumah yang belum atau tidak terpenuhi terdapat bermacam-macam penilaian terhadap 3 (tiga) metode perhitungan *backlog* model (DCA, Fordham, dan Cambridge) (Rosa, 2013), sehingga memperoleh informasi bahwa konteks dalam menggunakan *backlog* : Housing-Needs Assessment (HNA) dan *Housing-Market Assessment* (HMA). Pada HNA, *backlog* digunakan untuk mendeskripsikan kuantitas rumah yang perlu ditangani (dibangun untuk disewakan atau dijual); sedangkan pada HMA, *backlog* merupakan kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani.

kondisi fisik hunian yang tidak layak huni, nilai lahan semakin mahal, kemiskinan penduduk perkotaan yang disebabkan kemampuan pendataan masyarakat yang rendah dan kurang dapat bersaing didalam kehidupan perkotaan menjadi permasalahan awal akan munculnya hunian-hunian liar dan kumuh dan dikategorikan sebagai hunian tidak layak huni. Dan masalah tersebut perlu dilakukan pendataan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang tepat sasaran bilamana akan mewujudkan program-program yang berkaitan dengan penataan hunian dilingkungan dikawasan perkotaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan pemetaan kawasan wilayah permukiman rumah tidak layak huni kawasan Perdesaan Kabupaten Pamekasan khususnya dan mengetahui jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan skala prioritas di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Palenganan.

Backlog versi HNA : (i) berfokus pada aspek keterjangkauan (*affordability*) dan (ii) tidak memperhitungkan *supply-side*; *backlog* versi HMA; (i) berorientasi untuk menggerakkan *housing market-chain* dan (ii) merupakan hasil selisih antara *demand-side* terhadap *supply-side*.

Di negara Indonesia indikator penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memiliki indikator yang berbeda pada instansi atau Lembaga atau Dinas, misalnya pada KemenPUPR, BPS, BAPPENAS, Kemsos, Kemenkes, UNHABITAT. Apabila tempat tinggal atau hunian belum memenuhi standard minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, khususnya pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Berikut pada Tabel.1 terdapat indikator RTLH Menurut KemenPUPR, BPS, BAPPENAS, KEMENSOS, KEMENKES dan UNHABITAT

Tabel 1. Indikator Rumah Tidak Layak Huni Menurut KemenPUPR, BPS, BAPPENAS, KEMENSOS, KEMENKES dan UNHABITAT

No	Indikator penilaian	Instansi/Badan/Lembaga/Kementerian					
		KemenPUPERA	BPS	BAPPENAS	KEMENSOS	KEMENKES	UNHABITAT
1	Luas Lantai	< 9 m2/orang	< 8 m2/orang	-	-	luas ruang sempit	luas ruang sempit
2	Material lantai	tanah/ kayu kelas IV	bambu/tanah/kayu murah	-	tanah/semen kondisi rusak	material tidak kedap air dan lembab, licin	kualitas lantai sempit
3	Tinggi lantai	-	-	-	-	X<10 cm dari pekarangan, < 25 cm dari badan jalan	-
4	Material dinding	bilik banbu/rotan/rumbia/kayu kelas IV	bilik banbu/rotan/rumbia/kayu kelas IV	-	material mudah rusak dan lapuk	tidak kedap air, mudah terbakar, privacy <<	privacy < karena dinding buruk
5	Material penutup atap	daun/genteng plentong sudah rapuh	daun/genteng plentong sudah rapuh	-	-	-	material penutup atap buruk

6	Langit-langit	< 2,8 m dari lantai	-	-	material mudah rusak dan lapuk	min 2,4 m dari lantai	-
7	Konstruksi atap	kelemahan struktur pondasi, rangka bangunan (kolom, balok), dan kuda-kuda	-	ketidakamanan struktur (atap, kolom, pondasi)	konstruksi tidak aman dan tidak permanen	ketidakamanan struktur (atap, kolom, pondasi)	kelemahan dan ketidakamanan struktur
8	Kolom dan balok						
9	Pondasi						
10	Sanitasi	sanitasi buruk atau minim	sanitasi buruk atau minim	-	minim	sanitasi buruk	minim
11	Air bersih	-	-	air bersih / minum sangat minim	-	air bersih / minum sangat minim	air bersih / minum terbatas dan buruk
12	Pencahayaan	pencahayaan alami minim, lubang cahaya <1/10 luas lantai. R.publik (<50% dinding ke arah R.terbuka), Kamar(<10% dinding kearah R.terbuka)	pencahayaan alami minim	pencahayaan alami minim	-	luas jendela dan pintu < 10% luas bidang lantai	pencahayaan alami minim
13	Penghawaan	penghawaan minim <5% luas lantai	penghawaan alami minim	penghawaan alami minim	-	-	penghawaan alami minim
14	Secure Of Tenure	-	kepemilikan /penguasaan tanah <<	-	-	-	kepemilikan / penguasaan tanah <<
15	Sarana umum/sosial	-	-	kesehatan-pendidikan, usaha <<	-	-	kesehatan-pendidikan <<
16	Infrastruktur	-	-	infrastruktur terbatas dan buruk	-	-	infrastruktur terbatas dan buruk
17	Biaya perumahan	-	-	-	-	-	UN Affordable

Sumber : BPS 2019, Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2016

model perhitungan *backlog* berbeda-beda disetiap negara, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan di masing-masing negara tersebut. Pembahasan secara mendalam terkait dengan kebijakan perumahan di luar dari pembahasan penelitian ini, kebijakan yang di jadikan acuan dalam pembahasan ini, diambil yang bersifat utama, dilihat dari undang-undang perumahan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang kebijakan perumahan dan kawasan permukiman menyatakan bahwa masyarakat berperan aktif dalam penyediaan perumahan, dalam arti penyediaan perumahan masih menjadi tanggung jawab dari setiap rumah tangga sendiri. Pada perkotaan hunian berdasarkan Kebijakan hunian vertikal yang tertulis dalam produk perencanaan seharusnya bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka backlog dan memenuhi kebutuhan bermukim (Kasih dan Rahmawati, 2019). Subsidi bantuan pemerintah terhadap penyediaan perumahan masih sangat terbatas. Disamping itu adanya perbedaan data kebutuhan rumah terjadi karena adanya perbedaan konsep dasar persepsi *backlog*, KemenPUPR dan BPS (Badan Pusat Statistik) berdasarkan konsep kepala keluarga, sedangkan BPS berdasarkan konsep rumah tangga atau *ruta*.

Definisi rumah tidak layak huni menurut (KementrianPUPR, 2018) adalah Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.maka pada penelitian ini penulis melakukan pendataan dan melakukan analisis kepemilikan melalui 2 (dua) metode yaitu *backlog* rumah berdasarkan kepemilikan dan *backlog* rumah berdasarkan kepenghunan, selanjutnya setelah dilakukan analisis kepemilikan dan kepenghunan maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis skala prioritas yang masuk kedalam kategori prioritas rumah tidak layak huni melalui perhitungan skala prioritas.

Untuk menentukan model perhitungan *backlog* rumah terlebih dahulu yaitu menetapkan konsep dasar yang akan dijadikan acuan. Apakah penyediaan rumah ditetapkan satu unit shelter untuk satu rumah tangga atau satu kepala keluarga. Pada pembahasan ini akan di rumuskan model perhitungan *backlog* rumah bila menggunakan konsep kepemilikan dan konsep kepenghunan. Karena pemilihan konsep dasar ini akan mempengaruhi rumusan model perhitungan *backlog*. Dibawah ini akan di bahas dua tipe rumusan model *backlog* rumah, yaitu :

1. Tipe 1 berdasarkan konsep unit rumah tangga
2. Tipe 2 berdasarkan konsep kepala rumah tangga

2.1. Konsep unit rumah tangga

Rumusan model perhitungan *backlog* rumah. Beberapa definisi yang dijadikan acuan dalam menentukan rumusan model *backlog* rumah yang direkomendasikan dan digunakan di Indonesia (Rosa, 2013) :

1. Definisi kebutuhan rumah (*housing need*) adalah jumlah rumah yang sudah tersedia atau rumah
3. m/tidak tertangani (South Hampshire Housing, 2005) dalam (Wied, 2012).
4. *Backlog* rumah dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah atau satu rumah tangga atau kepala keluarga.
5. Definisi rumah tangga masih dibedakan menjadi :
Rumah Tangga Biasa yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai RT biasa antara lain :
 - a. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi permakannya diurus sendiri..
 - b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi permakannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
 - c. Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
 - d. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus permakannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus, yang termasuk atau dianggap sebagai rumah tangga khusus antara lain :

1. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya, asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsi). Anggota TNI dan POLRI yang tinggal bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.

tangga baru yang membutuhkan rumah layak huni. Penghuni dikatakan tinggal di dalam rumah layak huni bila penghuni tinggal didalam bangunan yang terbuat dari bahan-bahan bangunan permanen (Liu, Wu, dkk. 1996) dalam (Wied, 2012).

2. Penentuan rumusan model perhitungan *backlog* harus mengacu pada definisi *backlog*. Secara definisi, *backlog* adalah kuantitas rumah yang belum
 - a. Orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan.
 - b. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam satu rumah tangga dapat terdiri dari beberapa kepala keluarga. Sebagai gambaran, beberapa kepala keluarga yang tinggal dalam suatu asrama dengan menggunakan dapur dan kamar mandi bersama, perlu di keluarkan dari perhitungan *backlog*, karena merupakan satu rumah tangga, dan kebutuhan mereka akan tempat tinggal sudah terpenuhi. Disamping itu masyarakat yang tinggal di tempatkos atau kontrakan bersama, dimana menggunakan kamar mandi dan atau dapur bersama tidak termasuk dalam perhitungan *backlog*.

Selain itu kebijakan sistem penyediaan perumahan di Indonesia masyarakat merupakan aktor utama, karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah secara finansial masih sangat terbatas. Berdasarkan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dari beberapa instansi terkait, di setiap kota jumlah rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rumah. Untuk itu dalam rumusan model perhitungan kebutuhan rumah perlu dimasukkan variabel rumah tangga yang belum mempunyai tempat tinggal, didapat dengan mengurangi jumlah kepala keluarga dengan jumlah unit rumah terbangun. Pada Tabel.2 di bawah ini dapat dilihat, berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, jumlah rumah milik sendiri paling banyak (BPS kabupaten Pamekasan, 2017), dibandingkan dengan yang kontrak, sewa, dan rumah dinas.

Tabel 2. Status Kepemilikan Rumah Kabupaten Pamekasan

NO	KECAMATAN	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH					TOTAL	%
		MILIK SENDIRI	KONTRAK SEWA	BEBAS SEWA	RUMAH DINAS	LAINNYA		
1	TLANAKAN	16.386,00	148,00	539,00	82,00	-	17.155,00	7,72
2	PADEMAWU	21.388,00	197,00	720,00	109,00	-	22.414,00	10,09
3	GALIS	8.497,00	74,00	269,00	41,00	-	8.881,00	4,00
4	LARANGAN	16.184,00	145,00	532,00	81,00	-	16.942,00	7,63
5	PAMEKASAN	23.116,00	214,00	784,00	119,00	-	24.233,00	10,91
6	PROPO	18.059,00	164,00	599,00	91,00	-	18.913,00	8,51
7	PALENGAAN	18.673,00	170,00	621,00	94,00	-	19.558,00	8,80
8	PEGANTENAN	15.596,00	140,00	511,00	77,00	-	16.324,00	7,35
9	KADUR	12.458,00	110,00	402,00	61,00	-	13.031,00	5,87
10	PAKONG	9.089,00	79,00	289,00	44,00	-	9.501,00	4,28
11	WARU	15.605,00	140,00	511,00	77,00	-	16.333,00	7,35
12	BATUMARMAR	22.923,00	213,00	777,00	117,00	-	24.030,00	10,82
13	PASEAN	14.170,00	126,00	462,00	69,00	-	14.827,00	6,67
KAB. PAMEKASAN		212.144,00	1.920,00	7.016,00	1.062,00	-	222.142,00	100,0
PROSENTASE		95,50	0,86	3,16	0,48	-	100,00	

Sumber :Kab. Pamekasan Dalam Angka 2017, BPS Kab. Pamekasan

2.2. Pembiayaan perumahan masyarakat

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau, segenap warga negara Indonesia yang dimaksud juga termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR. Permasalahannya adalah masa sekarang ini sulit untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau. Pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau terkendala oleh faktor pembiayaan dari MBR (Ngaliyan, 2017) dan rendahnya pendapatan MBR mengakibatkan konsumen MBR sulit untuk membeli rumah yang layak baik secara teknis, ekonomi maupun sosial (Sihotang, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini meliputi pengumpulan data survei lapangan dan pembagian kuisioner selanjutnya dilakukan observasi, setelah itu penulis melakukan pemetaan permukiman perdesaan melalui perhitungan dengan metode skoring skala prioritas yang mengacu pada nilai pembobotan (Bramantyo et al., 2019) kemudian mengolah data dengan proses tumpang susun atau *overlay*. tahap berikutnya adalah melakukan basis data spasial dengan memasukkan data survei *backlog* kepemilikan rumah dan *backlog* kepenghunian, dimana dua metode tersebut digunakan mengacu dalam (KementrianPUPR, 2018), setelah didapatkan data

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selanjutnya penulis melakukan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep *backlog* kepemilikan rumah RTLH berdasarkan kepala rumah tangga

Namun perkembangannya permasalahan *backlog* kepemilikan rumah khususnya di Indonesia tidak hanya dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah saja. Sinergi antar seluruh *stake holder* juga dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini (Sentrand dkk., 2018). Konsep sebagai dasar dari rumusan model perhitungan tipe 2 dilakukan berdasarkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. diketahui bahwa *backlog* kepemilikan dihitung berdasarkan angka *homeownership rate*/ persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri bersumber dari data BPS (Pamekasan, 2019) Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan, diketahui bahwa nilai persentase kepemilikan rumah di Kabupaten Pamekasan sebesar 89,87 % (BPS kabupaten Pamekasan, 2017), maka perhitungan *Backlog* kepemilikan di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Palengaan dapat dilihat pada Tabel 3 *Backlog* kepemilikan rumah RTLH Kecamatan Batumarmar dan Tabel.4 *Backlog* kepemilikan rumah RTLH Kecamatan Palengaan Tahun 2019, sedangkan untuk proses pemetaannya menggunakan citra satelit *google earth* dan peta dasar menggunakan Peta RBI (Rupa Bumi

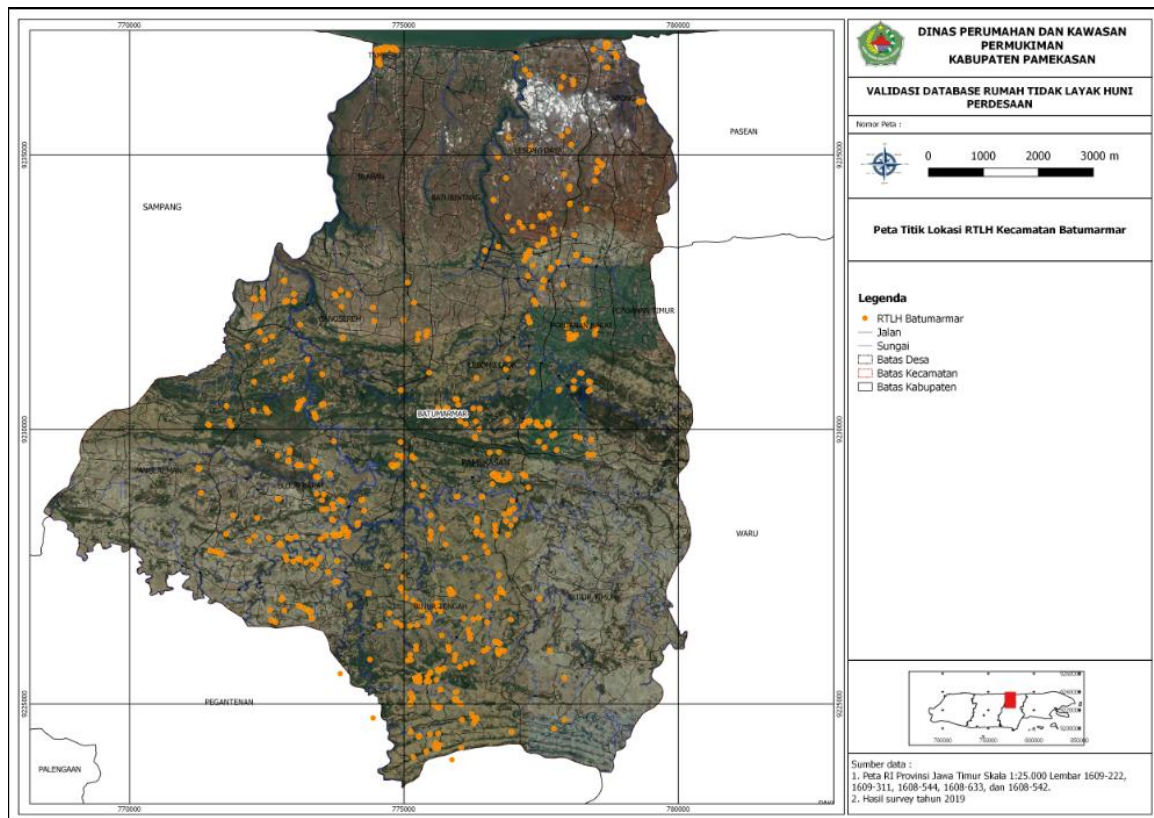
Indonesia) Jawa Timur dengan Skala 1:25000 dengan Nomor Blad peta 1609-222, 1609-311, 1608-544, 1608-633, dan 1608-542, untuk mendapatkan titik koordinat RTLH yaitu dengan melakukan survei ke titik lokasi penduduk tersebut berdomisili dikecamatan

Batumarmar, dengan menggunakan formulir kuisioner untuk didapatkan titik koordinatnya dapat dilihat pada Gambar 1 Peta titik lokasi RTLH Kecamatan Batumarmar dan Gambar 2 Peta titik lokasi RTLH Kecamatan Palengaan.

Tabel 3. Backlog Rumah RTLH Kecamatan Batumarmar Tahun 2019 Kabupaten Pamekasan

No	Tahun	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (Ruta)	Persentase Rumah Tangga Milik (BPS) (%)	Jumlah RUTA	Jumlah RUTA Non Milik/ Backlog Kepemilikan Rumah
1	2019	Pangereman	5349	1677	89.87	1507	170
2	2019	Bujur Barat	10774	2124	89.87	1909	215
3	2019	Bujur Tengah	12490	3298	89.87	2964	334
4	2019	Bujur Timur	10960	3372	89.87	3030	342
5	2019	Ponjanan Timur	8406	2113	89.87	1899	214
6	2019	Ponjanan Barat	5620	1440	89.87	1294	146
7	2019	Lesong Laok	2958	941	89.87	846	95
8	2019	Bangsereh	4614	1447	89.87	1300	147
9	2019	Blaban	8021	1938	89.87	1742	196
10	2019	Tamberu	2160	496	89.87	446	50
11	2019	Batu Bintang	12710	3596	89.87	3232	364
12	2019	Lesong Daja	3076	1067	89.87	959	108
13	2019	Kapong	3434	917	89.87	824	93
TOTAL			90572	24426		21952	2474

Sumber : Analisis 2019

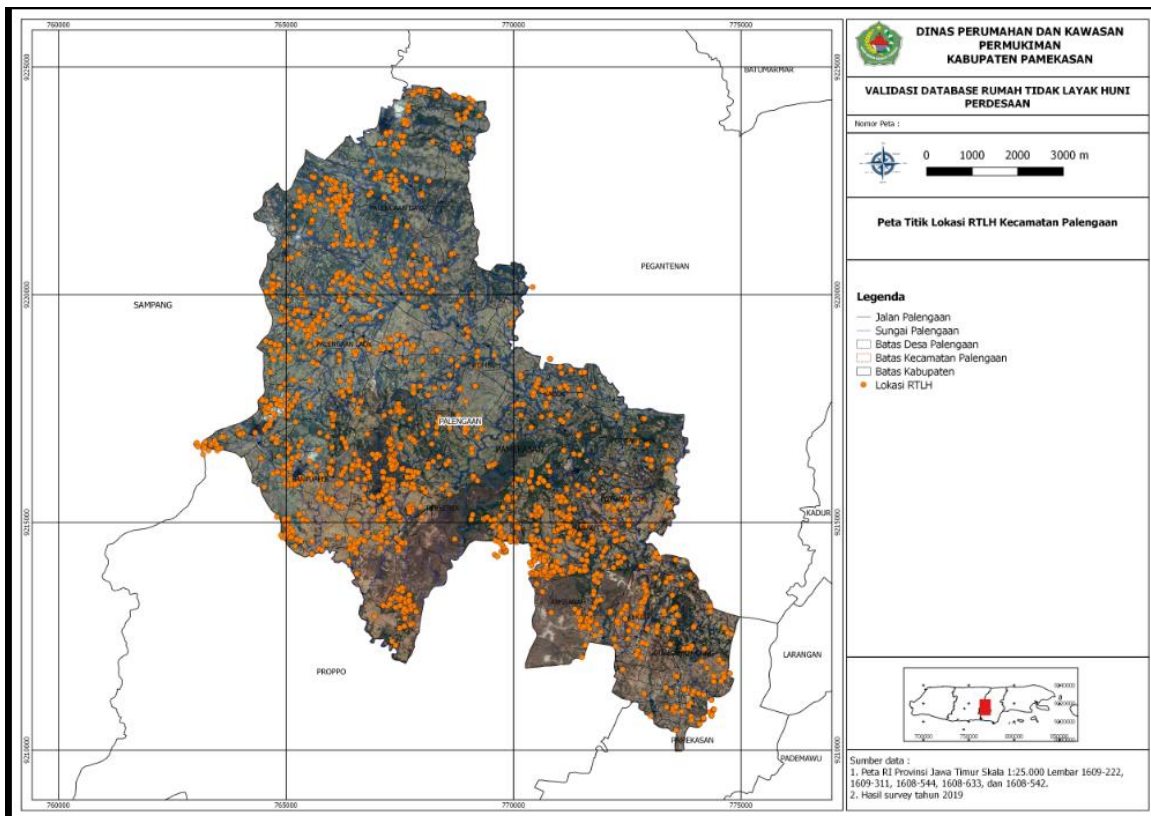


Gambar 1. Peta titik lokasi RTLH kecamatan Batumarmar

Tabel 4. Backlog Rumah RTLH Kecamatan Palengaan Tahun 2019 Kabupaten Pamekasan

No	Tahun	Desa (1)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (Ruta)	Persentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah RUTA	Jumlah RUTA Non Milik/ Backlog Kepemilikan Rumah
1	2019	Banyupelle	12178	2417	89.87	2172	245
2	2019	Rek Kerrek	15088	2851	89.87	2562	289
3	2019	Angsanah	5812	1097	89.87	986	111
4	2019	Akkor	4313	842	89.87	757	85
5	2019	Larangan Badung	9392	2290	89.87	2058	232
6	2019	Panaan	9732	820	89.87	737	83
7	2019	Potoan Laok	4370	601	89.87	540	61
8	2019	Potoan Daya	9290	750	89.87	674	76
9	2019	Kacok	5587	1041	89.87	936	105
10	2019	Rombuh	3462	903	89.87	812	91
11	2019	Palengaan Laok	12277	3029	89.87	2722	307
12	2019	Palengaan Daya	13558	3242	89.87	2914	328
TOTAL			105059	19883		17870	2013

Sumber : Analisis 2019



Gambar 2. Peta titik lokasi RTLH kecamatan Palengaan

4.2 Konsep backlog berdasarkan kependhunian

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait dengan bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah

dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kependhunian. Backlog Kependhunian dihitung mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Perhitungan Backlog Kependhunian bersumber dari data survey RTLH di Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Batumarmar tahun 2019. Rumus matematis yang digunakan untuk menghitung backlog rumah dari perspektif kependhunian adalah: maka perhitungan Backlog

kepemilikan di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Palengaan dapat dilihat pada Tabel 5 *Backlog* kepemilikan Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Palengaan Tahun 2019. Tabel 6

Tabel 5. *Backlog* Rumah Kecamatan Batumarmar Tahun 2019 Kabupaten Pamekasan

No	Tahun	Desa	Jumlah Penduduk (BPS)	Jumlah Keluarga (Survey)	Jumlah Rumah (Survey)
1	2019	Pangereman	5349	2199	2324
2	2019	Bujur Barat	10774	3289	2845
3	2019	Bujur Tengah	12490	2987	2882
4	2019	Bujur Timur	10960	3279	5667
5	2019	Ponjanan Timur	8406	2055	856
6	2019	Ponjanan Barat	5620	1581	875
7	2019	Lesong Laok	2958	1357	1164
8	2019	Bangsereh	4614	1618	1398
9	2019	Blaban	8021	2692	1812
10	2019	Tamberu	2160	850	841
11	2019	Batu Bintang	12710	2686	3695
12	2019	Lesong Daja	3076	1083	795
13	2019	Kapong	3434	993	735
TOTAL			90572	26669	25889

Sumber : Survei 2019

Tabel 6. *Backlog* Rumah Kecamatan Palengaan Tahun 2019 Kabupaten Pamekasan

No	Tahun	Desa	Jumlah Penduduk (BPS)	Jumlah Keluarga (Survey)	Jumlah Rumah (Survey)
1	2019	Banyupelle	12178	2563	2369
2	2019	Rek Kerrek	15088	4564	3162
3	2019	Angsanah	5812	1263	1244
4	2019	Akkor	4313	1510	1611
5	2019	Larangan Badung	9392	2984	2662
6	2019	Panaan	9732	1013	829
7	2019	Potoan Laok	4370	892	768
8	2019	Potoan Daya	9290	1145	1023
9	2019	Kacok	5587	1483	1377
10	2019	Rombuh	3462	1416	1180
11	2019	Palengaan Laok	12277	4459	4244
12	2019	Palengaan Daya	13558	4348	3297
TOTAL			105059	27640	23766

Sumber : Survei 2019

4.3 Analisis Skala Prioritas Rumah Tidak Layak Huni

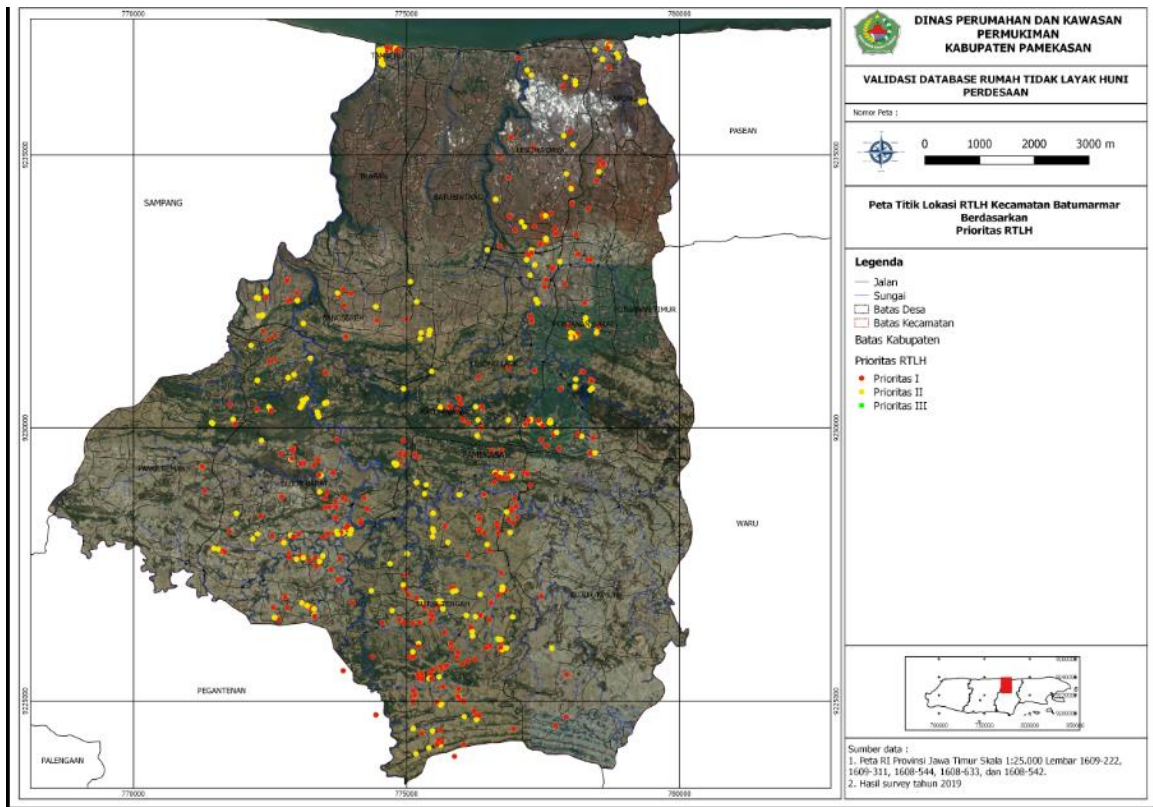
Rumah tidak layak huni yang tersebar di 2 kecamatan (Kecamatan Palengaan dan Batumarmar) yang terdiri atas 25 Desa di Kabupaten Pamekasan berjumlah 2778 unit rumah. Sejumlah rumah tidak layak huni yang di survey selanjutnya dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, dimana prioritas I merupakan rumah tidak layak huni dengan tingkat ketidak layakan paling tinggi berdasarkan aspek keselamatan (struktur dan non struktur), aspek kesehatan, dan aspek komponen bahan bangunan, disusul dengan prioritas II, dan prioritas III. Analisa yang digunakan untuk menentukan perioritas rumah tidak layak huni adalah analisa pembobotan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penentuan prioritas

berdasarkan pada hasil penjumlahan skor atau pembobotan penilaian pada setiap variabel, dimana rumah tidak layak huni dengan prioritas I memiliki hasil skor dengan rentang (21-54), prioritas II memiliki hasil skor dengan rentang (55-88), dan prioritas III memiliki hasil skor dengan rentang (89-123). Untuk table skala prioritas dapat dilihat di Tabel.7 dan hasil pemetaan skala prioritas dapat dilihat pada Gambar.3 titik lokasi RTLH kecamatan Batumarmar berdasar skala prioritas dan Gambar.4 titik lokasi RTLH Kecamatan Palengaan berdasar skala prioritas

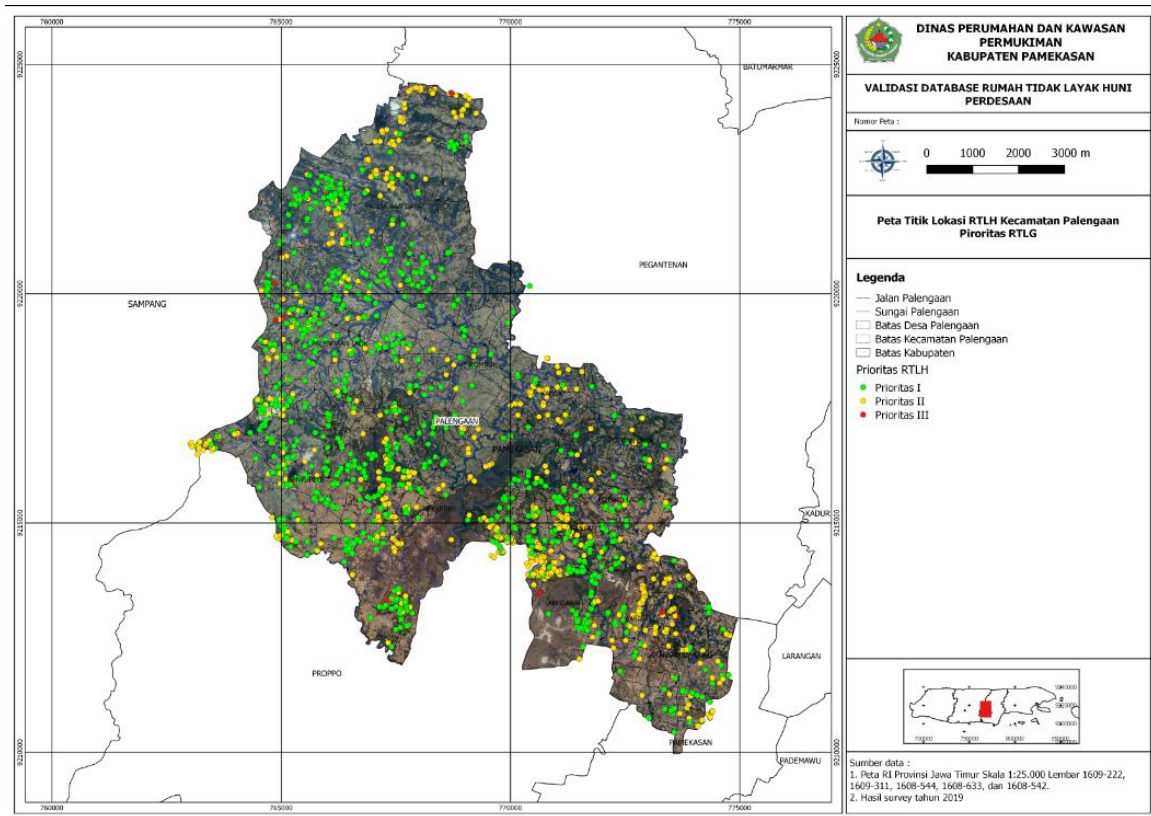
Tabel 7. Skala Pritis Kecamatan Palengaan dan Batumarmar 2019

No	Kecamatan	Skala Prioritas			Jumlah RTLH
		I	II	III	
1	Palengaan	999	737	26	1762
2	Batumarmar	602	461	8	1071
TOTAL		1601	1198	34	2833

Sumber : Hasil Analisis 2019



Gambar 3. Peta titik lokasi RTLH kecamatan Batumarmar berdasar skala prioritas



Gambar 4. Peta titik lokasi RTLH kecamatan Palengaan berdasar skala prioritas

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Total rumah tidak layak huni di Kecamatan Palengaan sebanyak 1.762 unit rumah, jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Desa Rekkerrek sebanyak 358 unit rumah dan terendah berada di Desa Rombuh sebanyak 19 unit rumah. *backlog* Kepenghunian di Kecamatan Palengaan berjumlah 3874 unit rumah dan *Backlog* Kepemilikan berjumlah 2014 unit rumah. Rumah tidak layak huni di Kecamatan Palengaan dengan prioritas I sebanyak 999 unit rumah, prioritas II sebanyak 737 unit rumah, dan prioritas III sebanyak 26 unit rumah.
- Total rumah tidak layak huni di Kecamatan Batumarmar sebanyak 1.071 unit rumah, jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Desa Bujur Tengah sebanyak 221 unit rumah dan terendah di

Desa Kapong yaitu 18 unit rumah. *Backlog* Kepenghunian di Kecamatan Batumarmar berjumlah 880 unit rumah dan *Backlog* Kepemilikan berjumlah 2.474 unit rumah. Rumah tidak layak huni di Kecamatan Batumarmar dengan prioritas I sebanyak 602 unit rumah, prioritas II sebanyak 461 unit rumah, dan prioritas III sebanyak 8 unit rumah.

Saran

- Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan analisis spasial secara komprehensif di Kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Dan melakukan pembaruan data atau updating data supaya data yang disajikan mengikuti perkembangan wilayah serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan khususnya di Kecamatan Palengaan dan Batumarmar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut. Dan secara

husus penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, serta Bapak Septa Erik Prabawa.S.Si.,MT, Bapak Prasdiatma Pratama,ST.,MT yang terlibat aktif dalam penyelesaian kegiatan penelitian dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantoro, S. A., dan Widayanti, B. H. (2020). *Analisis Backlog Perumahan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Utara*. 646–649.
- BPS kabupaten Pamekasan. (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan. In *Hhttps://Kamparkab.Bps.Go.Id* (Vol. 91, p. 19).
- Bramantyo, Tyas, W. P., dan Argyantoro, A. (2019). *Aspek Kualitas Rumah Subsidi Pada Program Rumah Murah Berdasarkan Perspektif Penerima Manfaat Studi Kasus : Perumahan Subsidi Mutiara Hati Semarang*. 14(1), 1–9.
- Kasih, N. A., dan Rahmawati, D. (2019). Perspektif Kebijakan Lokal Terkait Penyediaan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Mataram. *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan*, 1(1), 237–246. <https://doi.org/10.25105/pwkb.v1i1.5282>
- KementerianPUPR. (2018). PermenPUPR No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Peraturan Menteri PUPR*, 18.
- Ngaliyan, K. (2017). *Konsep Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. 5(4), 307–313.
- Pamekasan, B. K. (2019). *Kecamatan Batumarmar Dalam Angka 2019* (S. IPDS (ed.); p. 99). BPS Kabupaten Pamekasan. <https://doi.org/3528120.1301>
- Rosa, Y. (2013). RUMUSAN METODE PERHITUNGAN BACKLOG RUMAH Formulation of Housing Backlog Calculation Method. *Jurnal Permukiman*, 8(2), 58–68.
- Sentraland, S. K., Bekasi, V., Mailiando, F. X. M., Tresani, N., dan Mahmud, N. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MBR sebagai pendukung terciptanya rumah tangga yang berkualitas . Seiring dengan bertambahnya MBR . Untuk mendukung kebijakan tersebut , Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Pemerintah semata . Sinergi antar se. 2(2)*.
- Sihotang, S. (2017). *PARADIGMA PENGEMBANGAN HUKUM UNTUK MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN*. 9, 91–112.
- UU No.1. (2011). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Republik Indonesia*.